

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini dapat terselesaikan. Laporan ini berisikan uraian mengenai kinerja sasaran dan indikator sasaran, akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan program Pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustrian di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat



HAIZA RINSA.SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197104051991011001

IKHTISAR EKSLUSIF

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 salah satunya memprioritaskan bidang tenaga kerja dan perindustrian sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal.

Untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan sasaran beserta indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Rencana Kinerja Tahunan, dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 sebanyak 2 sasaran, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Untuk mencapai kinerja sasaran tersebut, terdapat 4 program 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran menunjukkan bahwa persentase pencapaian sasaran telah mencapai 100,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2025 telah baik dan terukur. Secara keseluruhan anggaran program dan kegiatan belanja langsung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 atau 93.60 % *Tingkat capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2025 sebesar 100, % dan tingkat capaian realisasi anggran 93.60 % dari total anggaran sebesar*

Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 , terdapat efisiensi sumberdaya pada tahun 2025 sebesar 6.4 %

Berdasarkan analisis capaian kinerja maka capaian kinerja sasaran secara umum sudah baik. Pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada setiap indikator adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

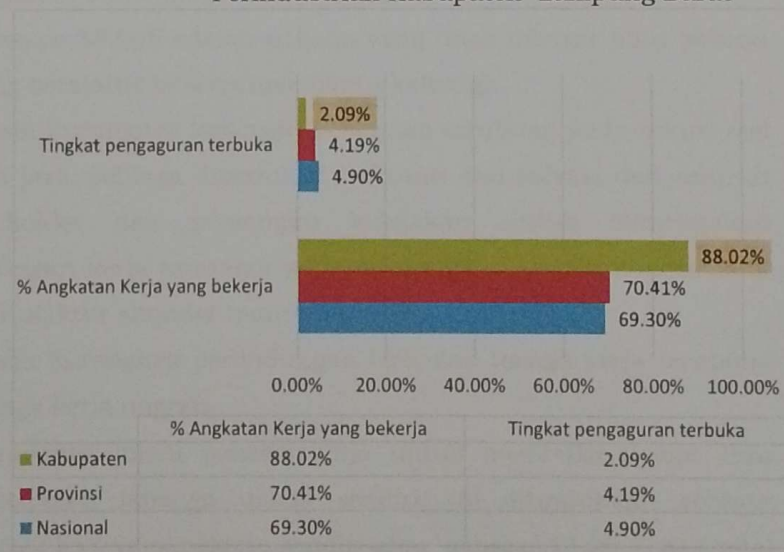
1. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator % Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja pada taun 2025 TPAK Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil survey BPS tahun 2025 sebesar 88,02 % meningkat sebesar 5 % dari tahun 2024 sebesar 82,83 % dengan tingkat pengaguran terbuka sebesar 2,09 %, dan jumlah angkatan kerja dengan umur diatas 15 Tahun sebesar 193.092 orang ini bermakna bahwa :
 - a. Peningkatan tingkat prekonomian masyarakat yang berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga.
 - b. Tersedianya lapangan kerja yang luas terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan industri manufaktur skunder.
 - c. Topografi wilayah yang aggraris memberikan peluang bagi angkatan kerja untuk berinovasi dalam penciptaan lapangan kerja pada sektor pertanian dan perkebuan serta manufaktur sekunder , hal ini ditunjukkan sebanyak 113.666 jiwa bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan 61.843 jiwa bekerja pada sektor manufaktur sekunder
2. Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita dengan indikator PDRB Sektor industri. PDRB Sektor industri berdasarkan harga berlaku Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil survey BPS tahun 2025 sebesar 430.030 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar

4,99 % dari tahun 2024 sebesar 413.490 Milyar, hal ini menunjukkan :

- a. Adanya peningkatan sebesar 10 % pada sektor usaha manufaktur dengan bertambah dan berkembangnya industri kecil dan menengah. hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah IKM pada tahun 2024 sebanyak 116 IKM, pada tahun 2025 menjadi 156 IKM dengan tingkat omset di tahun 2025 sebesar 457.718 Milyar
 - b. Dengan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Lampung Bgarat maka menciptakan lapangan kerja baru bagi pencari kerja pada sektor industri olahan dan manufaktur sekunder di lampung barat.
3. Perbandingan Capain Kinerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Jika dibandingkan dengan capain nasional, maka capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat sudah melampaui capain nasional seperti tergambar pada table berikut :

Capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat



A. Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan sebagai berikut:

- a. Topografi wilayah lampung barat yang berbentuk agraris sehingga memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang banyak untuk bekerja pada sektor pertanian , perkebunan dan industri manufaktur skunder atau olahan.
- b. Ketersediaan bahan baku indutri olahan yang melimpah sehingga memungkinkan pegusaha atau pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja
- c. Ketersediaan angkatan kerja usia diatas 15 tahun berjumlah 193.092 jiwa sehingga memungkinkan memberikan peluang dalam penyerapan tenaga kerja dalam sekala besar.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain adalah:

1. Sebanyak 4.043 pengangguran yang masuk dalam kategori angkatan kerja menjadi target pengentasan
2. Sebayak 55.966 adalah pekerja yang tidak dibayar atau pekerja yang berstatus bekerja membantu keluarga
3. Masih kurangnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor reel dan jasa, sehinga diperlukan trobosan dan inovasi dari seluruh sticholder dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor reel dan manufaktur baik manufaktur skunder maupun primer.
4. Masih kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja migran.
5. Kurangnya minat pencari kerja untuk membuka usaha atau penciptaan lapangn usaha sendiri, ini ditunjukkan sebesar 25.622 jiwa yang bekerja sendiri atau sebesar 13,26 % dari total angkatan kerja di lampung barat.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar penilain keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen SKP pada masing masing Pegawai.
2. Menyampaikan Reviu Lakip Yang dilakukan Oleh APIP Kabupaten tahun 2025.
3. Melakukan Evaluasi secara berkala pada target capain kenerja mulai dari tingkatan individu maupun OPD minimal 3 bulan sekali (Evalusi Renja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja).
4. Koordinasi dengan OPD terkait
5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna melalui Aplikasi SAKTI BERKIBAR

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	5
E. Isu Strategis.....	5
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS	
A. Rencana Strategis	7
B. Program dan Kegiatan.....	9
C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	14
D. Target Kinerja Tahun 2025	19
E. Pengukuran Kinerja	29
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	30
B. Analisis Sarana dan Prasarana	31
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025	32
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	33
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	35
C. Pengukuran, analisis capaian kinerja sasaran strategis	36
D. Analisa Faktor Penyebab Kegagalan	48

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan Umum.....	51
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	55
C. Permasalahan	56
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi	8
Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan.....	9
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.	15
Tabel 2.4. Rincian pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025	15
Tabel 2.5. Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang Dilaksanakan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	20
Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Menurut Status.....	30
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Menurut.....	30
Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	31
Tabel 3.5. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat	31
Tabel 4.1. Capain Indikator Kinerja Utama 2025	36
Tabel 4.2. Capain Indikator Kinerja Utama Strategis 2025.....	37
Tabel 4.3. Capain Kinerja Sasaran	37
Tabel 4.4. Analisi Capain Sasaran 1	39
Tabel 4.5. Penduduk Usia Kerja	40
Tabel 4.6. Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025.....	41
Tabel 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan LB.....	4
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Grafik.4.1. Perbandingan TPT Kabupaten, Provinsi dan Nasional 2023-2025.	42
Grafik 4.2. PDRB Sektor Industri dan Perumbuhan 2023-2025.	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban Sebagai Berikut

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

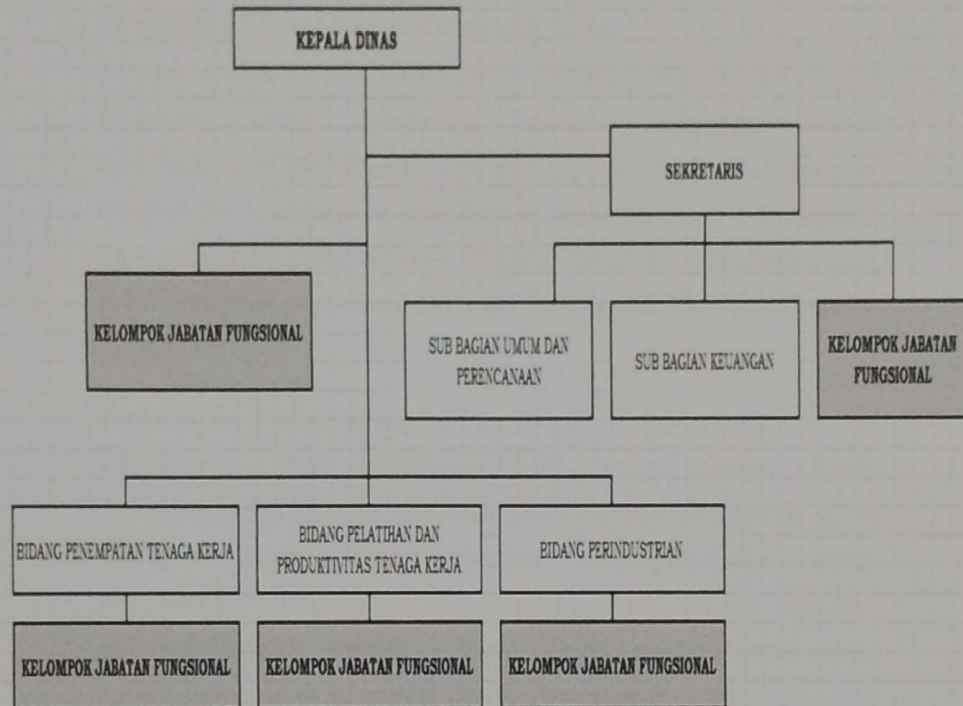
C. Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas HAIZA RINSA.SH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berperan secara aktif untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan perluasan dan penempatan tenaga kerja yang bermartabat yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja

E. Isu Strategis

a. Perluasan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja dikatakan cukup banyak, akan tetapi, angkatan kerja semakin bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup tinggi. Penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor untuk dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja yang

semakin banyak yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

b. Peningkatan Mutu dan Kemampuan Kerja

Secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga dalam meningkatkan kemampuan tersebut perlu dilakukan dengan melalui berbagai upaya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar didayagunakan semaksimal mungkin.

c. Penyebaran Tenaga Kerja

Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang merata baik secara sektoral maupun regional. Secara regional penyebaran angkatan kerja masih bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata baik secara sektoral maupun regional akan menyulitkan penyediaan tenaga kerja secara maksimal.

d. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja ialah tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan keahlian serta minatnya dan bukan pekerjaan yang dipaksakan.

e. Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pengembangan sektor IKM di dalam negeri, antara lain melalui pembangunan sentra IKM

yang bertujuan untuk mewadahi sekumpulan unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2030 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

Didalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, diperlukan langkah – langkah strategis dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dari kebijakan yang diambil. Adapun strategi OPD Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja Melalui Kebijakan :
 - A. Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja
 - B. Peningkatan Hubungan Industrial
 - C. Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Kerja
 - D. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri
 - A. Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industrial
 - B. Penumbuhan dan pengembangan IKM
 - C. Peningkatan omset IKM

Tabel 2.1. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan RPD : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Sasaran RPD : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	A. Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja B. Peningkatan Hubungan Industrial C. Peningkatan Pelatihan dan

			Produktivitas Kerja D. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	A. Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industrial B. Penumbuhan dan pengembangan IKM C. Peningkatan omset IKM

B. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan yaitu:

Tabel 2.2 Rencana Program dan Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
02.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
02.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
02.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
02.07.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD
02.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.07.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan
02.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
02.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
02.07.01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
02.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
02.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD
02.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
02.07.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
02.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

	Daerah SKPD
02.07.01.2.03.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
02.07.01.2.04.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02.07.01.2.04.04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
02.07.01.2.04.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal
02.07.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu
02.07.01.2.06.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
02.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
02.07.01.2.07.04	Pengadaan Mebel
02.07.01.2.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02.07.01.2.07.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
02.07.01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
02.07.01.2.07.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02.07.02.	Program Perencanaan Tenaga Kerja
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro
02.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
02..07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
02..07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
02..07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi
02..07.03.2.01.02	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota
02..07.03.2.02	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

02..07.03.2.02.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil
02..07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
02..07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
02..07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja
02..07.04.2.01.02	Perluasan Kesempatan Kerja
02..07.04.2.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
02..07.04.2.02.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
02..07.04.2.03	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota
02..07.04.2.03.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
02..07.05	Program Hubungan Industrial
02..07.05.01.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
02..07.05.01.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
02..07.05.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.02.01.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

02.07.05.2.01.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industrial
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tere\integrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahan
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota

C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka pendanaan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui programdan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	%	87.02 %
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri	Milyar	372855

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan program prioritas Kabupaten mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Rincian pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu 2025
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.122.338.736
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.122.338.736
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.276.063.650
2	07	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.073.300

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

2	07	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.529.800
2	07	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.920.000
2	07	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.000
2	07	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000
2	07	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000
2	07	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000
2	07	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.124.500
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.991.258.950
2	07	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.988.758.950
2	07	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000
2	07	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000
2	07	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
2	07	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.689.000
2	07	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.689.000
2	07	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.147.400

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

2	07	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
2	07	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.926.400
2	07	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000
2	07	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.943.000
2	07	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.778.000
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.360.000
2	07	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2	07	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.400.000
2	07	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.960.000
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.535.000
2	07	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.575.000
2	07	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.960.000
2	07	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	177.111.490
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	177.111.490
2	07	03	2,01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	153.705.490

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

2	07	03	2,01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	23.406.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	69.014.000
2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.485.000
2	07	04	2,01	0002	Pelayanan antar Kerja	37.485.000
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.081.200
2	07	04	2,03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.081.200
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	21.447.800
2	07	04	2,04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI /Pekerja Migran Indonesia PMI	21.447.800
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	600.149.596
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.705.000
2	07	05	2,01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.705.000
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	639.033.996
2	07	05	2,02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.886.600
2	07	05	2,02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	42.044.000
2	07	05	2,02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	564.103.396

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	713.153.900
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	713.153.900
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	653.976.900
3	31	02	2,01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	206.461.900
3	31	02	2,01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	447.515.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.389.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.389.000
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	43.389.000

D. Target Kinerja Tahun 2025

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dalam bentuk Rencana Kerja Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025. Dalam RKT tersebut telah disusun sasaran dan Target Kinerja OPD tahun 2025 beserta indikator kinerjanya. Dapat dilihat dalam table :

Tabel. 2.5 Sasaran Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Anggaran	
				Tahun 2025	
				Target	Rp
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	87.02 %	3.122.338.736
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja		% TPAK	87.02%	3.122.338.736
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.122.338.736
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.122.338.736
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	69 Point	2.276.063.650
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	16 okumen	28.073.300
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	13.529.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RK	1 Dokumen	2.920.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.499.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.000.000

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	500.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	7.124.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.991.258.950
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.988.758.950
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	500.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 okumen	1.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 okumen	9.689.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	1 okumen	4.689.000

		Kinerja Pegawai		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyaknya Paket Administrasi Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.147.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.926.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.943.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.778.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	133.360.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.960.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Unit	53.535.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	37.575.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2025

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 Orang	177.111.490
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 Orang	177.111.490
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	20 Orang	153.705.490
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	23.406.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5%	69.014.000
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	335,00	37.485.000
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	335,00	37.485.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	1Dokumen	10.081.200
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1Dokumen	10.081.200
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	21.447.800
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI /Pekerja Migran Indonesia PMI	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	10 Orang	21.447.800
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Laporan perlindungan tenaga kerja	1 Laporan	600.149.596
	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi	1 Laporan	32.705.000

		dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	32.705.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah		639.033.996
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah		32.886.600
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		42.044.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah orang yang dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan		564.103.396
		Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri	372.855 Milyar	713.153.900
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	372.855 Milyar	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			

	PERINDUSTRIAN			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	8 %	713.153.900
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	4 %	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	3 Dokumen	653.976.900
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	206.461.900
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	447.515.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% IKM yang terdata disistem informasi industri nasional	12 %	43.389.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	43.389.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan resiko usaha menenagah dan tinggi melalui SIINas yang ter integrasi dengan sistem OSS	1 Dokumen	43.389.000

E. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data yang relevan dengan setiap indikator kinerja sasaran. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023.

Persentase capaian kinerja dilakukan dengan membagi realisasi kinerja dengan target dengan rumus sebagai berikut:

- **Kondisi 1:**

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin tinggi, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- **Kondisi 2:**

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Orang					Jumlah
		SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
1.	Kepala Dinas					1	1
2.	Sekretariat			1	2	2	5
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja				2	1	3
4.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja		1		1	1	3
5.	Bidang Perindustrian				4	1	5

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Menurut Status

No	Uraian	Status Kepegawaian (orang)				Jumlah
		PNS	PTT	THLS	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	1			1	
2.	Sekretariat	4		2	6	
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	5		1	6	
4.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja	3	0	1	4	
5.	Bidang Perindustrian	6	2	0	8	

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Menurut Kependagkatan

No	Uraian	Golongan(Orang)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretariat			4	1	5
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja			3		3
4.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja		1	1	1	3
5.	Bidang Perindustrian			5	1	6

Tabel 3.4. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

No	Uraian	ESELON			JFU	JFT	JUMLAH
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1					1
2.	Sekretariat		1	1			2
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja		1		1	1	3
4.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja		1		1		2
5.	Bidang Perindustrian		1		1	3	5

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung	3 unit
3	Komputer	6 unit
5	LCD Proyektor	2 unit
6	Printer	3 unit
10	Filling kabinet	6 unit
11	Kursi 1 biro	6 unit
12	Kursi lipat	10 unit
14	Meja ½ biro	5 unit
15	Meja 1 biro	6 unit
17	Kendaraan Roda dua	1 unit
18	Kendaraan Roda Empat	1 unit

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 4 program 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp. 3.122.338.736 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.988.758.950, Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.381.602.786. Belanja Modal Rp.0

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Industri.

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	%	87.2	88,02	100.00
2	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	Milyar Rp	372855	413490	113.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator % Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator PDRB Sektor Industri (milyar rupiah), dengan capaian kinerja 113 %.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Industri, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja

sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun
2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	%	87.2	88,02	100.00
2	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	Milyar Rp	372855	413490	113.00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- o kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- o kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- o Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- o kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- o kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4. Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	%	82,83 %	82,83 %	100.00	87.2	88,02	100.00

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja " *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang bekerja Kabupaten Lampung Barat Pada tahun 2025 sebesar 87,2 % meningkat sebesar 6 % dari tahun 2024 sebesar 82,83 %* %, ini menunjukkan adanya kenaikan Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 5 % dari Angakatrn Kerja di Kabupaten Lampung barat pada tahun 2024 185.269 dan pada tahun 2025 189.049. persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja " tahun ini adalah sebesar 88,02 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Industri sebesar 90 % maka capaian kinerjanya mencapai sampai dengan tahun 2025 sebesar 91.11 % %.

Dalam pencapai pada target ini ada indikator – indikator yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pencapaian sebagai berikut :

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat sebesar 189.541 orang, data ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 4.512 orang jika dibanding tahun sebelumnya (tahun 2024). Total angkatan kerja tahun 2025

sebesar 193.092 orang yang terdiri dari 189.049 orang penduduk yang bekerja dan 4.043 penduduk yang menganggur. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah bukan angkatan kerja yang mengalami kenaikan pada tahun 2025. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2025 jumlah bukan angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu sebesar 39.275 orang menjadi 41.588 orang pada tahun 2025.

Sedangkan pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan sebesar 3.780 orang sehingga total angkatan kerja tahun 2025 sebesar 193.092 orang yang terdiri dari 189.049 orang penduduk yang bekerja dan 4.043 penduduk yang menganggur. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5.
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

URAIAN	2023	2024	2025
ANGKATAN KERJA	194.053	189.541	193.092
- BEKERJA	189.970	185.269	189.049
- PENGANGGURAN	4.083	4.272	4.043
BUKAN ANKATAN KERJA	39.275	41.588	39.509
- SEKOLAH	15.047	15.409	14.639
- MENGURUS RUMAH TANGGA	19.867	23.811	22.620
- LAINNYA	4.361	2.368	2.250

Sumber : BPS, Tahun 2025

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja dan distribusi pekerjaan di suatu negara atau wilayah pada tahun tertentu. Pada tahun 2025 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri berjumlah 25.622 orang, hal ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu sebesar 59.550 orang.

Berusaha dibantu buruh tetap adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang

buruh/pekerja tetap yang dibayar. Jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap adalah sebesar 5.008 orang, sedangkan jumlah buruh/karyawan/pegawai di Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar 28.490 orang. Jumlah pekerja bebas sebesar 14.413 orang, jumlah pekerja tidak dibayar sebesar 55.966 orang. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 41.588 orang.

Tabel.4.6.
Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025

STATUS PEKERJAAN	JUMLAH
BERUSAHA SENDIRI	25.622
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	59.550
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	5.008
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	28.490
PEKERJA BEBAS	14.413
PEKERJA TIDAK DIBAYAR	55.966
BUKAN ANGKATAN KERJA	40.021
TOTAL	229.070

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan jumlah angkatan kerja Pemerintah Provinsi Lampung dan nasional.

Tabel 4.7. Perbandingan jumlah Angkatan kerja Pemerintah
Provinsi Lampung dan nasional

Angkatan Kerja	Jumlah
Nasional	152.11 Juta Jiwa
Provinsi Lampung	4.996.750 Jiwa
Lampung Barat	193.092 Jiwa

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, 2025.

Untuk mengintervensi jumlah angkatan kerja di Lampung Barat dinas tenaga kerja dan perindustrian melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Misi 1			
Proses Utama 1			
INPUT	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja		OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
			% Angkatn Kerja Yang Bekerja

2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

URAIAN	2023	2024	2025
TPT	2,10%	2,25%	2,09%

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Barat pada kurun waktu 2023 hingga 2025 cenderung fluktuatif. TPT tahun 2023 sebesar 2,10% naik menjadi 2,25% pada 2024 dan menurun menjadi 2,09% pada tahun 2025. Persentase TPT Lampung Barat selama 3 tahun terakhir berada di bawah TPT Provinsi Lampung. Hal ini berarti jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Lampung Barat selalu lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung semalam 3 tahun berturut-turut.

Grafik.4.1. Perbandingan TPT Kabupaten, Provinsi dan Nasional 2023-2025



Sumber: diolah tim, 2025.

Seseorang dikatakan bekerja atau tidak masuk dalam kategori pengangguran jika bekerja dalam sehari selama 3 jam. Sektor pertanian dan perkebunan mendominasi lapangan pekerjaan. Banyak angkatan kerja yang berusia 15 tahun keatas bekerja membantu orang tua di kebun milik keluarga atau orang lain sehingga tidak mendapatkan upah, serta bekerja lebih dari 3 jam sehari. Maka angkatan kerja seperti ini tidak masuk dalam kategori menganggur. Realitas ini merupakan risiko dari wilayah bertopografi agraris dengan sumber pendapatan masyarakat mayoritas merupakan petani atau pekebun.

Topografi wilayah lampung barat yang merupakan daerah agraris, pendapatan penduduk yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan merupakan faktor pendukung tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Jika di lihat dari data jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun atau angkatan kerja di lampung barat yang termasuk didalam pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebanyak 4.043 jiwa, ini mengalami penurunan sebanyak 229 dari tahun 2023 yang sebanyak 4.272 jiwa, artinya sebanyak 229 orang telah mendapatkan pekerjaan. Ini dapat dilihat dari data penempatan tenaga kerja di kabupaten lampung barat sebagai berikut :

Tabel 4.8.Data Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri

Tahun	Pekerja Dalam Negeri	Pekerja Migran Indonesia	Total
2025	151 Orang	78 Orang	229 Orang

Sumber Data : Disnakerprind LB 2025

3. Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Angka ini juga disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Ketika faktor-faktor ini berubah, partisipasi angkatan kerja akan naik atau turun. Perubahan ini dapat terjadi dengan cepat atau lambat. Perubahan ini mungkin berdampak jangka pendek pada partisipasi angkatan kerja, atau mungkin menciptakan perubahan jangka panjang. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang bekerja di kabupaten lampung barat pada tahun 2025 sebesar 88,02 % ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar 82,83 %. Ini menunjukkan trend positif angkatan kerja yang bekereja di lampung barat, jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi, TPAK Lampung Barat berada diatas TPAK Provinsi yang sebesar 70,41 % dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.4.9. Perbandingan TPAK Kabupaten dan Provinsi

Ket	2024	2025
% TPAK Lampung Barat	82,83 %	88,02 %
% TPAK Provinsi Lampung	70,41 %	75,41 %

Persebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Lampung Barat Tahun 2023 dan 2025 dapat dilihat dari data dibawah ini:

Kab	2024				2025			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Total	Pertanian	Manufaktur	S (Jasa)	Total
Kab. Lampung Barat	131.960	7.456	45.853	185.269	113.666	13.536	61.847	193.092

Jika dilihat dari status pekerjaan maka dapat dilihat pada data berikut:

Kab	2025						
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	Total
Kab. LB	25.622	59.550	5.008	28.490	14.413	55.966	193.092

Tingkat partisipasi Angkatan kerja berkaitan dengan Tingkat pengangguran terbuka. Rendahnya TPT tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Jika banyak pekerjaan yang tersedia merupakan pekerjaan informasi atau bergaji rendah, maka angkat TPT yang rendah bisa menutupi masalah kualitas kerja. Banyaknya penduduk yang tidak masuk dalam angkatan kerja (karena putus asa mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja), TPT bisa terlihat rendah, padahal kesempatan kerja tetap sulit didapatkan.

Fakta yang terjadi di Lampung Barat, TPT rendah (2,09%) tapi TPAK tinggi (88,02%) semntra provinsi TPT 4,19 % dan TPAKnya 75,41. Kondisi ini menunjukkan angkatan kerja kita masih tergantung pada

sektor formal, dan kurang inovasi dalam penciptaan lapangan kerja atau dengan kata lain belum bisa membuka lapangan usaha atau kerja sendiri.

Jadi pendapatan perkapita kita berkisar Rp.28 juta pertahun masih rendah dibanding Kota Bandar Lampung yang TPT nya 5,21% namun TPAK nya sebesar 63.45 % dengan pendapatan perkapita meraka sebesar Rp.51,37 juta pertahun.

Untuk mencapai kinerja pada sasaran ini dinas tenaga kerja dan perindustrian melaksanakan kegiatan yang teruatang dalam proses bisni tahun 2025 seperti tergambar pada grafik dibawah ini :

Misi 1			
Proses Utama 1			
INPUT	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja		OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
			% Angaktn Kerja Yang Bekerja

Sasaran 2
Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto sektor Industri

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya PDRB Sektor Industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	PDRB Sektor Industri (Milyar Rupiah)	Milyar Rp	365.544	413.490	113	372.855	430.030	113

Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Industri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator 1 "PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)" adalah sebesar 430.030 milyar dari target sebesar 372.855 Milyar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)" tahun ini adalah sebesar 430.030 Milyar, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Industri maka sebesar 380.312 milyar capaian kinerjanya lebih dari 100%.

Dalam mencapai pada target ini ada indikator – indikator yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pencapaian sebagai berikut:

1. PDRB sektor industri adalah peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu, misalnya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah. PDRB sektor industri pengolahan terdiri dari beberapa subkategori, di antaranya:

- Industri Batubara dan Pengilangan Migas
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Pengolahan Tembakau

- Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
- Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
- Industri Kertas dan Barang dari Kertas
- Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
- Industri Logam Dasar

PDRB dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu:

- Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
- Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga
- Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan inventori
- Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Pada laporan ini menitik beratkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri manufaktur dan pengolahan. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku pada sektor industri manufaktur dan pengolahan dikabupaten lampung barat tahun 2025 sebesar 430.030 Milyar, dari target yang diperjanjkan sebesar 372.855 Milyar, dengan distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha sebesar 4,99 %. Ini dapat dilihat dari tabel data pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor manufaktur dan pengolahan 2023 dan 2025 sebagai berikut

Grafik 4.2.PDRB Sektor Industri dan Pertumbuhan 2023-2025



Jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Lampung berdasarkan harga berlaku pada tahun 2025 menurut data BPS PDRB Provinsi Lampung sebesar 91.584.623,67 maka PDRB Sektor industri kabupaten Lampung Barat menyumbang sebesar 0.45 % PDRB Provinsi Lampung atau sebesar 430.030 Milyar naik sekitar 5 % dari tahun 2023 sebesar 413.490 Milyar. Untuk mencapai kinerja pada sasaran ini dinas tenaga kerja dan perindustrian melaksanakan kegiatan yang teruatang dalam proses bisnis tahun 2025 seperti tergambar pada grafik dibawah ini :

Misi 2				
Proses Utama 2				
INPUT	Meningkatnya PDRB Sektor Industri			OUTPUT
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaran Industri	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	PDRB Sektor Industri (Milyar)

Dari uraian capaian target sasaran yang di perjanjikan tahun 2025 diatas secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi		% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	87.2 %	88.02 %
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja		% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	87.2 %	88.02 %
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 Orang	20 Orang
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 Orang	20 Orang
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5%	5%
		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	330 Orang	448 Orang

		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	330 Orang	448 Orang
		Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	78 Orang
		Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	1 Laporan	1 Laporan
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita			PDRB Sektor Industri	372855 (Milyar)	430.030 (Milyar)
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri		PDRB Sektor Industri (Milyar)	372855 (Milyar)	430.030 (Milyar)
		Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4%	5%
			Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	4%	5%
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	3 Laporan	3 Laporan

B. Analisis faktor penyebab kegagalan

1. Angkatan Kerja

Faktor-faktor yang menghambat angkatan kerja di lampung barat antara lain:

- Rendahnya kualitas tenaga kerja: Rendahnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia.
- Tidak seimbangnya angkatan kerja dan kesempatan kerja: Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan persaingan ketat dan pengangguran.

- Kurangnya lapangan kerja: Ledakan jumlah penduduk berkontribusi pada kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup.
- Persebaran tenaga kerja yang tidak merata: Kurangnya kesempatan kerja di daerah tertinggal.
- Kesenjangan keterampilan: Pendidikan formal sering berfokus pada teori, sedangkan pasar tenaga kerja membutuhkan keterampilan teknis dan kemampuan praktis yang lebih terspesialisasi.
- **Kurangnya pelatihan:** Kurangnya anggaran dana kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja, serta kurangnya inovasi dalam pembuatan program pelatihan.

Beberapa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja dan perindustrian di kabupaten lampung barat pada tahun 2025 yang dituangkan kedalam proses bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi Anggran	Sisa Anggaran
	BELANJA DAERAH	3.554.811.361,00	3.327.212.592	227.598.769
	Belanja Operasi	3.554.811.361,00	3.327.212.592,00	227.598.769
	Belanja pegawai	1.819.003.075,00	1.704.147.213	114.855.862
	belanja barang dan jasa	1.408.908.286,00	1.296.165.379	112.742.907
	belanja hibah	270.000.000,00	270.000.000	-
	Belanja Modal	56.900.000,00	56.900.000,00	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.983.488.361,00	2.779.900.724	203.587.637
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.983.488.361,00	2.779.900.724	203.587.637
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.125.497.775,00	1.995.046.603	130.451.172
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.073.300,00	27.816.300	257.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.529.800,00	13.401.800,00	128.000
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.920.000,00	2.920.000,00	-
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.000,00	2.499.000,00	-
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	500.000,00	-
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	500.000	-
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.124.500,00	6.995.500,00	129.000

2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.824.753.075,00	1.709.897.213	114.855.862
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.819.003.075,00	1.704.147.213	114.855.862
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000,00	2.900.000	-
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.850.000,00	1.850.000	-
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000	-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.689.000,00	4.689.000	-
2.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.689.000,00	4.689.000	-
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.837.400,00	100.996.593	3.840.807
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000	-
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.926.400,00	8.926.400	-
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	3.720.000	-
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.943.000,00	6.943.000	-
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.468.000,00	71.407.193	60.807
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.260.000,00	106.298.696	9.961.304
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.300.000,00	44.338.696,00	9.961.304,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.960.000,00	56.960.000,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.885.000,00	45.348.801	1.536.199

2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.925.000,00	30.194.142,00	730.858
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.960.000,00	5.154.659	805.341
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000	-
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	175.408.990,00	174.538.032	870.958
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	175.408.990,00	174.538.032	870.958
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	152.002.990,00	151.356.200	646.790
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	23.406.000,00	23.181.832	224.168
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	69.014.000,00	68.786.915	227.085
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.485.000,00	37.326.515	158.485
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	37.485.000,00	37.326.515,00	158.485
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.081.200,00	10.052.550	28.650
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.081.200,00	10.052.550	28.650
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	21.447.800,00	21.407.850	39.950
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	21.447.800,00	21.407.850	39.950
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	599.366.996,00	528.254.224,00	71.112.772,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	18.759.100,00	18.114.100,00	645.000

2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	566.247.596,00	496.855.400,00	69.392.196,00
2.7.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.360.300,00	13.284.724,00	1.075.576
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	571.323.000,00	547.311.868	24.011.132
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	43.389.000,00	40.174.925	3.214.075
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.389.000,00	40.174.925	3.214.075
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.389.000,00	40.174.925	3.214.075
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	43.389.000,00	40.174.925	3.214.075
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	527.934.000,00	507.136.943	20.797.057
3.31.02.2.01	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	527.934.000,00	507.136.943	20.797.057
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	163.967.000,00	156.334.468	7.632.532
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	363.967.000,00	350.802.475	13.164.525
JUMLAH		3.554.811.361,00	3.327.212.592	227.598.769

C. Realisasi Anggaran

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 atau 93.60 %. Tingkat capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2025 sebesar 100, % dan tingkat capaian realisasi anggran 93.60 %. dari total anggaran sebesar Rp. Rp. Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 , terdapat evisiensi sumberdaya pada tahun 2025 sebesar 6.4 % maka dapat disimpulkan bahawa dengan sarana dan prasarana yang tercantu diatas, dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten lampung barat dapat memaksimalkan kinerja dinas yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah tercantun di dalam renstra dinas belum dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan tenaga kerja dan perindustrian di kabupaten lampung barat.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun telah mencapai hasil sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja Tahun 2025

D. Pemanfaatan Laporan

Laporan kinerja perangkat daerah berisi informasi tentang: Rencana kinerja, Capaian kinerja, Evaluasi dan analisis kinerja, Efisiensi penggunaan sumber daya, Hambatan pelaksanaan rencana kerja. Laporan kinerja perangkat daerah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Manfaat laporan kinerja perangkat daerah secara lebih rinci adalah:

- Memberikan informasi kinerja kepada pemberi mandat
- Membantu meningkatkan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan
- Memberikan informasi untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan

- Membantu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
- Membantu meningkatkan pelayanan publik
- Membantu mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

BAB V.
PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaiann
1.	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	100 %
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	113 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 atau 93.60 %**

Tingkat capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2025 sebesar 100, % dan tingkat capaian realisasi anggran 93.60 %. dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 3.554.811.361 dan teralisasi sebesar Rp 3.327.212.592 , terdapat evisiensi sumberdaya pada tahun 2025 sebesar 6.4 % maka dapat disimpulkan bahawa dengan sarana dan prasarana yang tercantu diatas, dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten lampung barat dapat memaksimalkan kinerja dinas yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah tercantun di dalam renstra dinas belum dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan tenaga kerja dan perindustrian di kabupaten lampung barat.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun telah mencapai hasil sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja Tahun 2025 Adapun dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis capaian kinerja maka capaian kinerja sasaran secara umum sudah baik. Pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada setiap indikator adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator % Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja pada taun 2025 TPAK Kabupaten Lampung Barat

berdasarkan hasil survey BPS tahun 2025 sebesar 88,02 % meningkat sebesar 5 % dari tahun 2024 sebesar 82,83 % dengan tingkat pengaguran terbuka sebesar 2,09 %, dan jumlah angkatan kerja dengan umur diatas 15 Tahun sebesar 193.092 orang ini bermakna bahwa :

- a. Peningkatan tingkat prekonomian masyarakat yang berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga.
 - b. Tersedianya lapangan kerja yang luas terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan industri manufaktur skunder.
 - c. Topografi wilayah yang aggraris memberikan peluang bagi angkatan kerja untuk berinovasi dalam penciptaan lapangan kerja pada sektor pertanian dan perkebunan serta manufaktur sekunder , hal ini ditunjukkan sebanyak 113.666 jiwa bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan 61.843 jiwa bekerja pada sektor manufaktur sekunder
2. Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita dengan indikator PDRB Sektor industri. PDRB Sektor industri berdasarkan harga berlaku Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil survey BPS tahun 2025 sebesar 430.030 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar 4,99 % dari tahun 2024 sebesar 413.490 Milyar, hal ini menunjukkan :
- a. Adanya peningkatan sebesar 10 % pada sektor usaha manufaktur dengan bertambah dan berkembangnya industri kecil dan menengah. hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah ikam pada tahun 2024 sebanyak 116 IKM, pada tahun 2025 menjadi 156 IKM dengan tingkat omset di tahun 2025 sebesar 457.718 Milyar
 - b. Dengan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Lampung Bgarat maka menciptakan lapangan

kerja baru bagi pencari kerja pada sektor industri olahan dan manufaktur sekunder di lampung barat.

3. Perbandingan Capain Kinerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Jika dibandingkan dengan capain nasional, maka capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat sudah melampaui capain nasional seperti tergambar pada table berikut :

Tabel 5.1 Capain kinerja Dinas

NO	Indikator	Capaian Nasional	Capain Provinsi Lampung	Capai Kabupaten Lampung Barat
1.	% Angkatan Kerja yang bekerja	69,30 %	70,41 %	88,02%
2.	Tingkat pengaguran terbuka	4,91 %	4,19 %	2,09%

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan sebagai berikut:

- a. Topografi wilayah lampung barat yang berbentuk agraris sehingga memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang banyak untuk bekerja pada sektor pertanian , perkebunan dan industri manufaktur skunder atau olahan.
- b. Ketesedian bahan baku indutri olahan yang melimpah sehingga memungkinkan pegusaha atau pelaku usaha untuk meningkatkan kapsitas produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja
- c. Ketersedian angkatan kerja usia diatas 15 tahun berjumlah 193.092 jiwa sehingga memungkinkan memberikan peluang dalam penyerapan tenaga kerja dalam sekala besar.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain adalah:

1. Sebanyak 4.043 pengaguran yang masuk dalam kategori angkatan kerja menjadi target pengentasan
2. Sebanyak 55.966 adalah pekerja yang tidak dibayar atau pekerja yang berstatus bekerja membantu keluarga
3. Masih kurangnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor reel dan jasa, sehingga diperlukan terobosan dan inovasi dari seluruh sticholder dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor reel dan manufaktur baik manufaktur skunder maupun primer.
4. Masih kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja migran.
5. Kurangnya minat pencari kerja untuk membuka usaha atau penciptaan lapangn usaha sendiri, ini ditunjukkan sebesar 25.622 jiwa yang bekerja sendiri atau sebesar 13,26 % dari total angkatan kerja di lampung barat.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar penilain keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen SKP pada masing masing Pegawai.
2. Menyampaikan Reviu Lakip Yang dilakukan Oleh APIP Kabupaten tahun 2025.
3. Melakukan Evaluasi secara berkala pada target capain kenerja mulai dari tingkatan individu maupun OPD minimal 3 bulan sekali (Evaluasi Renja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja).
4. Koordinasi dengan OPD terkait

5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui Aplikasi SAKTI BERKIBAR

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

